



Opini Organisatoris Lembaga Kemahasiswaan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi

Erick Serfyan Agustin, M. E. Fuady*

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 27/09/2024

Revised : 16/12/2024

Published : 25/12/2024



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 95 - 100

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh opini, respons, sikap, pandangan dan peran yang diungkapkan oleh berbagai lembaga kemahasiswaan, serta media yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait putusan MK tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi dengan mendalam opini organisatoris lembaga kemahasiswaan mengenai keputusan MK. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data disini peneliti menggunakan metode Ketekunan Pengamatan, Triangulasi dan Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi. Subjek penelitian atau key informan dalam penelitian ini ialah organisasi kemahasiswaan di dalam lingkungan perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kritik yang dilontarkan mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap potensi nepotisme dan intervensi politik yang dapat mengancam integritas dan independensi lembaga peradilan. Mahasiswa mencari serta memilih sumber informasi yang mereka gunakan dengan mengandalkan sumber-sumber yang sah dan terpercaya serta melakukan verifikasi lintas media untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka terima. Selain itu, mereka aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk protes dan kampanye di media sosial untuk memperjuangkan transparansi dalam hukum dan proses politik di Indonesia.

Kata Kunci : Opini Organisatoris, Media Massa, Perubahan

ABSTRACT

This research aims to thoroughly understand the opinions, responses, attitudes, views and roles expressed by various student organizations, as well as the media used to obtain related information The Constitutional Court's decision. The researcher used a qualitative method with a case study approach to explore in depth the organizational opinions of student organizations regarding the Constitutional Court's decision. In testing the validity of the data here the researcher used the method of Diligently Observation, Triangulation and Peer Examination through discussion. The research subjects or key informants in this research are student organizations within higher education institutions in the city of Bandung. The results of this research show that the criticism expressed by students towards the decisions of the Constitutional Court (MK) reflects their concerns about the potential for nepotism and political intervention which could threaten the integrity and independence of the judiciary. Students search for and select sources of information that they use by relying on legitimate and trusted sources and carrying out cross-media verification to ensure the veracity of the information they receive. In addition, they actively participate in various forms of protests and campaigns on social media to fight for transparency in laws and political processes in Indonesia.

Keywords : Organizational Opinion, Mass Media, Change

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Pada Februari 2024, Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, masyarakat akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil, transparan dan sesuai dengan prinsip – prinsip konstitusional yang berlaku. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam memastikan validitas dan keabsahan pemilihan umum. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum di antaranya memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilu, memeriksa keberlakuan undang-undang terkait pemilu, hingga memutuskan terkait perubahan undang-undang jika ada perselisihan tentang kesesuaian suatu perubahan perundang-undangan dengan prinsip yang telah tercantum dalam konstitusi (Sulistianingsih et al., 2023).

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan Putusan (90/PUU-XXI/2023, n.d.) Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 merupakan kejadian “luar biasa” yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Ia menyatakan, kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah standar usia berdasarkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menunjukkan bahwa postur dan sikap Mahkamah berubah dalam putusan tersebut. Diskusi mengenai kekuatan mahasiswa untuk melakukan perubahan telah dimulai menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi. Ada kebutuhan bagi siswa untuk mengisi kesenjangan antara keadaan yang rumit dan pilihan hukum karena mereka adalah anggota masyarakat yang progresif dan penting. Dengan mendorong penafsiran yang lebih jelas atas keputusan pengadilan, mereka dapat mendorong keterbukaan dan keadilan, mengurangi dugaan yang sia-sia, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi dari proses pengambilan keputusan melalui pendidikan politik (Arifin, 2003; Eriyanto, 2012).

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial ini dan dianggap menciderai serta melecehkan konstitusi, tentu menyebabkan kegaduhan hingga membentuk spekulasi dan opini yang beredar di tengah kalangan masyarakat, akademisi bahkan organisatoris mahasiswa. Mahasiswa secara proaktif mencari informasi dari berbagai sumber, dengan fokus pada media massa cetak dan digital. Mereka menggunakan platform internet, portal berita, surat kabar cetak, dan media sosial untuk berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia dan mendengarkan sudut pandang orang lain (Darajat & Yulianti, 2024). Literasi media penting bagi mahasiswa untuk mengenali sumber berita yang andal dan tidak memihak serta menganalisis konteks informasi yang mereka peroleh dari media (Al Mega & Ahmadi, 2022; Qorib et al., 2022; Refi Maulana Yusuf & Dadi Ahmadi, 2022). Organisasi-organisasi di kampus dapat mengadvokasi demokrasi yang lebih besar dan reformasi dengan menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan (Faiq Muhammad Fauzan et al., 2024; Rachmiate et al., 2013).

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji pandangan kelompok mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menaikkan batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini akan berpusat pada bagaimana kelompok mahasiswa dan media terlibat dalam mengumpulkan informasi tentang keputusan tersebut, serta reaksi, pandangan, dan tanggung jawab mereka (Ahmadi et al., 2023; Iskandar Cakranegara et al., 2023). Studi ini juga akan melihat bagaimana perasaan mahasiswa dan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu transformasi demokrasi dan hukum di Indonesia. Untuk menyusun gambaran pandangan dan reaksi organisasi mahasiswa yang berbeda. Selain itu, pembahasan juga akan membahas bagaimana keputusan tersebut berdampak pada aktivisme mahasiswa untuk perubahan demokratis dan hukum, serta bagaimana mahasiswa terlibat secara politik setelah keputusan tersebut. Selain itu, tulisan ini melihat cara-cara mahasiswa mengekspresikan keinginan mereka untuk pemerintahan yang lebih demokratis, realisasi hak konstitusional, dan perubahan kebijakan (Muttaqin et al., 2021; Rindu et al., 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Yin, 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai pandangan, sikap, dan respons lembaga kemahasiswaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Metode studi kasus dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi fenomena yang kompleks

dalam konteks nyata, khususnya dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik (Creswell, 2010; Moleong, 2004; Sugiyono, 2012).

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden telah memicu reaksi yang cukup keras dari kalangan mahasiswa. Mereka melihat keputusan ini sebagai upaya elit untuk melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan.

Lembaga kemahasiswaan khawatir bahwa perubahan ini akan membuka jalan bagi nepotisme dan intervensi politik yang lebih besar dalam proses pemilihan presiden. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendukung calon yang mereka kehendaki, seperti yang diutarakan oleh Siregar (Siregar, 2023), "Nepotisme dalam politik Indonesia masih sangat kuat, dan keputusan ini bisa memperkuat praktik tersebut dengan cara yang lebih halus."

Selain itu, lembaga kemahasiswaan menekankan pentingnya etika dalam penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa keputusan yang meloloskan calon tanpa pengalaman yang memadai mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan integritas hukum. Hal ini sejalan dengan konsep "*High Politic*" dan "*Low Politic*" yang dijelaskan oleh M.E. Fuady, di mana "*High Politic*" diterjemahkan sebagai sebuah sikap politik adiluhung, politik luhur, dan politik berdimensi moral etis. Politik dengan landasan kejujuran dan kepercayaan. Sedangkan *Low Politic* adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan." (Fuady, 2006)

Dalam mengumpulkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa mengandalkan berbagai sumber media. Mereka tidak hanya mengakses portal berita online dan media sosial, tetapi juga media cetak dan jurnal akademik untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Proses verifikasi informasi dilakukan dengan hati-hati melalui cross-checking berbagai sumber. Menurut Sudiby, "Keberagaman sumber informasi yang digunakan mahasiswa menunjukkan tingkat literasi media yang tinggi dan kritis" (Sudiby, 2023).

Mahasiswa tidak hanya mengumpulkan informasi tetapi juga aktif dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui berbagai bentuk protes dan kampanye. Media sosial telah menjadi alat utama dalam mengorganisir aksi dan menyebarkan pesan mereka. Mereka menggunakan platform seperti Twitter dengan tagar-tagar yang populer, Instagram untuk visual kampanye, dan Facebook untuk diskusi lebih mendalam. Dewi menekankan, "Kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat mobilisasi menunjukkan adaptasi mereka terhadap teknologi modern dalam advokasi." (Dewi, 2024)

Selain itu, mahasiswa juga mengadakan demonstrasi dan forum diskusi di kampus untuk membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut penelitian dari Pratama, "Diskusi dan debat yang dilakukan di kampus bukan hanya meningkatkan kesadaran politik tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mahasiswa." (Pratama, 2024)

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah menjadi katalis bagi aktivisme mahasiswa yang lebih intensif. Mereka melihat pentingnya mengisi celah antara kebijakan yang ada dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Aktivisme mahasiswa telah berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir dan strategis. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan (2023), "Mahasiswa menyadari peran mereka sebagai agen perubahan dan terus mendorong reformasi melalui berbagai saluran." (Ramadhan, 2023)

Di Bandung, organisasi mahasiswa telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi panel, dan aksi turun ke jalan. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh BEM Universitas Padjadjaran, yang mengundang akademisi dan praktisi hukum untuk membahas dampak putusan tersebut terhadap sistem politik di Indonesia. Firdaus mencatat, "Seminar ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih dalam tetapi juga menginspirasi mahasiswa untuk terus berjuang demi keadilan dan transparansi." (Firdaus, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden bukan hanya memicu reaksi spontan, tetapi juga memunculkan gerakan jangka panjang di kalangan mahasiswa. Mereka tidak hanya terlibat dalam aksi protes sesaat, melainkan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa suara mereka tetap didengar.

Mahasiswa memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan kesadaran dan mendapatkan dukungan luas. Mereka menciptakan petisi online yang mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali putusan tersebut. Petisi ini tidak hanya ditandatangani oleh mahasiswa tetapi juga oleh masyarakat umum yang merasa keputusan ini tidak adil. Platform-platform seperti Change.org menjadi tempat bagi mereka untuk mengumpulkan tanda tangan dan menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap isu ini.

Selain petisi, mahasiswa juga meluncurkan kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi politik di kalangan generasi muda. Mereka mengadakan workshop dan seminar yang bertujuan untuk mendidik rekan-rekan mereka tentang hak-hak politik dan cara-cara untuk terlibat dalam proses demokrasi. Kegiatan-kegiatan ini sering kali melibatkan pembicara tamu dari kalangan akademisi, aktivis, dan praktisi hukum yang memberikan wawasan lebih dalam tentang isu-isu politik terkini.

Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan gerakan mereka, mahasiswa juga membentuk aliansi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Aliansi ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan sumber daya dan tenaga, sehingga gerakan mereka dapat memiliki dampak yang lebih besar. Contohnya, kerjasama dengan lembaga non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada demokrasi dan hak asasi manusia memberikan mahasiswa akses ke jaringan dan dukungan yang lebih luas.

Implikasi jangka panjang dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi perhatian utama bagi mahasiswa. Mereka khawatir bahwa perubahan ini dapat menjadi preseden bagi kebijakan-kebijakan lain yang juga membatasi hak-hak politik warga negara. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengawal setiap perkembangan hukum yang berkaitan dengan partisipasi politik dan memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak merugikan kepentingan publik.

Dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa juga mulai memperkuat keterlibatan mereka dalam proses politik formal. Beberapa dari mereka memutuskan untuk terlibat dalam partai politik atau mendukung calon yang sejalan dengan visi mereka. Mereka percaya bahwa dengan berada di dalam sistem, mereka dapat lebih efektif memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Partisipasi politik aktif adalah kunci untuk memastikan bahwa suara generasi muda didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, reaksi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan mereka, tetapi juga memperlihatkan komitmen mereka untuk terlibat dalam proses politik dan hukum di Indonesia. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap inklusif dan adil. Melalui berbagai bentuk partisipasi dan advokasi, mahasiswa berusaha menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam sistem politik dan hukum di negara ini.

Model Helix Dance digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika komunikasi dan perubahan opini di kalangan mahasiswa. Model ini menggambarkan bahwa komunikasi bersifat spiral, di mana informasi baru dan interaksi sosial terus mempengaruhi dan membentuk kembali pandangan dan sikap individu. Dalam konteks ini, model Helix Dance membantu menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima, memproses, dan menyebarkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Sunarto, "Model Helix Dance menunjukkan bahwa perubahan opini di kalangan mahasiswa tidak terjadi secara linier tetapi melalui proses yang dinamis dan berulang." Hal ini terlihat dari cara mahasiswa terus mengkaji dan mendiskusikan informasi baru yang mereka terima, serta bagaimana interaksi mereka dengan berbagai sumber informasi dan komunitas mempengaruhi pandangan mereka (Toto, 2023).

Artikel ini menemukan bahwa mahasiswa tidak hanya mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi tetapi juga mengajukan berbagai rekomendasi untuk reformasi hukum dan politik. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lembaga peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho, "Reformasi hukum harus melibatkan suara masyarakat, terutama generasi muda, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka" (Nugroho, 2023).

Mahasiswa mengusulkan beberapa langkah konkret, termasuk peningkatan transparansi dalam proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, pembatasan intervensi politik dalam keputusan hukum, dan peningkatan pendidikan hukum di kalangan masyarakat umum. Mereka percaya bahwa dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat diperkuat dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan media memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran politik mahasiswa. Melalui media, mahasiswa mendapatkan akses ke berbagai informasi yang membantu mereka memahami isu-isu politik dan hukum dengan lebih baik. Kartika menyebutkan, “Media telah menjadi jendela bagi mahasiswa untuk melihat dan memahami dinamika politik yang terjadi di luar kampus mereka.” (Kartika, 2024).

Selain protes dan kampanye, mahasiswa juga terlibat dalam advokasi kebijakan. Mereka berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan melalui berbagai cara, seperti petisi, audiensi dengan pejabat pemerintah, dan kampanye kesadaran publik. Menurut Yusuf, “Mahasiswa saat ini lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga pelaku perubahan.” (Yusuf, 2023)

Salah satu contoh kampanye media sosial yang sukses adalah kampanye Transparansi Hukum yang diluncurkan oleh mahasiswa di Bandung. Kampanye ini berhasil menarik perhatian luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Melalui kampanye ini, mahasiswa berhasil menggali dukungan untuk meminta transparansi lebih dalam proses pengambilan keputusan hukum. Aditya mencatat, “Kampanye ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam mobilisasi dan advokasi, serta bagaimana mahasiswa dapat menggunakan teknologi untuk mempengaruhi perubahan sosial.” (Aditya, 2023). Tulisan ini menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan kritis terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mereka mengkhawatirkan adanya nepotisme dan intervensi politik yang dapat mengancam integritas lembaga peradilan. Mahasiswa menggunakan berbagai media untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi, serta aktif berpartisipasi dalam protes dan kampanye untuk memperjuangkan transparansi dalam hukum dan politik. Aktivisme mahasiswa meningkat sebagai respons terhadap keputusan ini, menunjukkan keinginan mereka untuk terlibat dalam reformasi hukum dan politik di Indonesia. Dengan menggunakan model Helix Dance, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi dan perubahan opini di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk reformasi hukum dan politik yang melibatkan partisipasi aktif dari generasi muda.

D. Kesimpulan

Opini organisatoris lembaga kemahasiswaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mencerminkan beragam kritik yang mendalam. Lembaga kemahasiswaan menilai bahwa putusan tersebut menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dan mencerminkan adanya kepentingan politik tertentu serta membuka peluang bagi praktik nepotisme. Mereka mempertanyakan motivasi di balik perubahan tersebut dan menyoroti dampaknya terhadap demokrasi dan keadilan di Indonesia. Kritik ini juga mencakup kekhawatiran bahwa putusan tersebut memberikan kesan bahwa hukum bisa diubah sesuai dengan kebutuhan politik tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap sistem demokrasi.

Mahasiswa sangat cermat dalam memilih sumber informasi yang digunakan untuk mengkritisi putusan MK. Mereka menggunakan verifikasi silang untuk memastikan keabsahan data. Peran Mahasiswa dalam Reformasi Hukum dan Demokrasi: Mahasiswa berperan aktif dalam mendukung reformasi hukum dan demokrasi setelah putusan MK, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kritis tetapi juga berusaha memberikan kontribusi positif bagi perubahan sistem hukum di Indonesia. Kritik yang dilontarkan mahasiswa mencakup aspek nepotisme, etika, dan penegakan hukum. Mereka menyoroti putusan MK yang dianggap janggal dan terkesan dipaksakan, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas hukum di Indonesia.

Artikel ini menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perubahan undang-undang yang memiliki dampak luas terhadap sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia. Melalui kritik yang konstruktif, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga integritas dan etika dalam sistem politik dan hukum, serta mendorong praktik pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- 90/PUU-XXI/2023, P. M. N. (n.d.). *Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Mahkamah Konstitusi.
- Aditya, F. (2023). Kampanye Media Sosial untuk Transparansi Hukum. *Jurnal Sosial Media*.
- Ahmadi, D., Lisnur, W., Nurrahman, A. A., Yanuarti, E., & Basudewa, M. I. (2023). Improving scientific literacy through management of electronic journal using the “open journal system.” *AIP Conference Proceedings*, 2824(1). <https://doi.org/10.1063/5.0158230>
- Al Mega, A. N. P., & Ahmadi, D. (2022). Perencanaan Komunikasi Digital Akun Instagram @ASPAN_Lampung. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i2.3592>
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Darajat, N. Z., & Yulianti, N. (2024). Pengelolaan Media Sosial Instagram dalam Gerakan Aksi Kemanusiaan dan Pendidikan. *Jurnal Riset Public Relations*, 4(1), 65–70. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v4i1.3898>
- Dewi, N. (2024). *Mobilisasi Sosial Melalui Media Digital*. Penerbit Digital Media.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. LKiS.
- Faiq Muhammad Fauzan, Firmansyah, & Dadi Ahmadi. (2024). Bentuk Jurnalisme Warga dalam Pemberitaan di Media Online. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital (JRJMD)*, 4(1), 1–8.
- Firdaus, I. (2023). *Seminar dan Edukasi Politik di Kampus*. Universitas Padjadjaran.
- Fuady, M. E. (2006). Dilema Moral: Kepalsuan dan Keteladanan Komunikasi Politik di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 195–200. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1283>
- Iskandar Cakranegara, D., Ahmadi, D., Santana Kurnia, S., Indra Karsa, S., & Islam Bandung, U. (2023). The Role of Local Mass Media in Anticipating Hoax Information (Case Study at Radar Tasikmalaya). *Nyimak Journal of Communication*, 7(1), 55–70.
- Kartika, R. (2024). *Media dan Kesadaran Politik Mahasiswa*. Media Literasiedia.
- Moleong, J. L. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Nugroho, T. (2023). *Reformasi Hukum dan Partisipasi Generasi Muda*.
- Pratama, F. (2024). *Diskusi dan Debat Mahasiswa di Kampus*. Pustaka Pelajar.
- Qorib, F., Utami Rezkiauwaty Kamil, S., Jumrana, & La Tarifu. (2022). Reshaping Today’s Education with Social Media. *Jurnal Riset Public Relations*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrpr.vi.1355>
- Rachmiate, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. In *Terakreditasi’ SK Kemendikbud* (Vol. 29, Issue 2). Desember.
- Ramadhan, M. (2023). *Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan*. Penerbit Muda.
- Refi Maulana Yusuf, & Dadi Ahmadi. (2022). Kampanye Budaya Beberes di Media Sosial Instagram. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 151–158. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i2.1530>
- Rindu, B., Vinny, N., Fatkhiyatul, E., Amalia, N., Suluh, D., & Dewi, K. (2020). Promosi atau Sosialisasi Politik PDIP di Media Twitter. *Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah Di Era Revolusi Industri 4.0*, 33–42.
- Siregar, D. (2023). Nepotisme dalam Politik Indonesia. In *Nepotisme dalam Politik Indonesia*. Pustaka Rakyat.
- Sudiby, H. (2023). *Tingkat Literasi Media di Kalangan Mahasiswa*. Penerbit Universitas.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>
- Toto, S. (2023). Model Helix Dance dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Penerjemah: M. Duazi Mudzakir. PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, A. (2023). *Partisipasi Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan*. Pustaka Muda.